

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang telah merdeka lebih dari setengah abad tepatnya Pada 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mengingat konsekuensi dari negara yang telah merdeka yaitu negara Indonesia bebas menentukan ekspresi sebagai negara demokratis. Kebebasan untuk menjalankan negara yang telah sepenuhnya menjadi milik negara. Oleh karena itu Indonesia menetapkan haluan-haluan sebagai dasar hukum negara Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semua kehidupan bernegara, budaya, sosial harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pada periode sebelum tahun 1998, kekuasaan pemerintah pusat Republik Indonesia sangat sentralistik dan seluruh wilayah Republik Indonesia tersebut menjadi perpanjangan tangan kekuasaan (pemerintah pusat) Jakarta. Dengan kata lain, kekuasaan Orde Baru melibatkan kekuasaan yang terpusat, yaitu untuk pusat dan bukan untuk pinggiran (daerah).¹

Daerah yang kaya sumber daya, hasil produksi dialihkan dan dibagi diantara elit Jakarta alih-alih diinvestasikan dalam pembangunan daerah. Akibatnya, pembangunan antara daerah dan Jakarta tersendat. Saat ini pemerintah telah fokus terhadap percepatan pembangunan daerah, dengan berbagai langkah dan program prioritas oleh pemerintah pusat sebagai bentuk utama dalam mempercepat pembangunan redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia.²

¹ Malley Michael, *“Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan”* dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi* (Jakarta: PT Gramedia, 2001), 122.

² Munarni *“Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Potensi Desa”* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area 2015), 1.

Sistem pemerintahan daerah saat ini dengan asas desentralisasi suatu refleksi reformasi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Di Indonesia memiliki pergeseran pelayanan publik dengan wewenang pemerintah pusat untuk menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam kenyataannya otonomi daerah ini, untuk pembagian wilayah kekuasaan menjadi dua bagian, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara konstitusional ada di dalam kerangka negara Indonesia. Secara teoritis, awal dari pemekaran ini adalah upaya mempercepat perwujudan masyarakat yang sejahtera, dengan dua alasan pokok yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.³

Program pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah daerah akan diukur pada sejauh mana kesejahteraan masyarakat di daerah yang sudah ditingkatkan, pelayanan sejauh mana yang disediakan pemerintah daerah khususnya Kota Banjar terhadap masyarakat setempat. Dengan demikian bahwa kebijakan sebagai bentuk upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan umum.⁴ Secara normatif maupun filosofis, agama Islam yang sangat peduli terhadap mewujudkan kesejahteraan sosial di pengaruhi oleh beberapa faktor. Islam bermakna selamat, tentram dan damai. Ini sangat sejalan dengan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu aman, sentosa, damai, makmur dan selamat di tambahkan di dunia dan di akhirat. Dari sini kita bisa meninjau visi Islam yang senantiasa mendorong kejalan yang benar (*Hanif*) atau condong kedalam kebenaran secara fungsi sekaligus visi seorang pemimpin

³ Ratri Furry, Sasana Hadi, "Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Dan Kinerja Pelayanan Publik Di Kota Serang", *Jurnal, Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 2, Nomor 3 (Januari 2013), 2.

⁴ Arry Djauhari, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Perimbangan Keuangan Terhadap Kualitas Pelayanan Puskesmas: Studi Kasus Kota Banjar Propinsi Jawa Barat", *Jurnal, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Sosiohumaniora*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2010), 26.

juga sudah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk misi kerasulan sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Anbiyaa' : 107⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”⁶

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Seterusnya di jelaskan juga, pada ayat (5) menyebutkan, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”⁷ Sejak saat itu pemekaran yang ada di Indonesia meningkat tajam tepatnya pasca Orde Baru sampai 2014 dalam website resmi Kementerian Dalam Negeri menunjukan terapat 34 provinsi dan 417 kabupaten serta 98 kota di indonesia.

Pasal 32 Ayar (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemekaran atau pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih dari setiap daerahnya menjadi daerah baru.⁸ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang haknya urusan pemerintahan menambahkan bahwa setiap kewenangan daerah juga meliputi bagaimana pembentukan ketetapan kebijakan daerah untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi hak dan kewenangan daerah, seperti Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan

⁵ Muhammad Akram Khan, “Methodology of Islamic Economics” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Method ology of Islamic Economics* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), 59.

⁶ Al Hamid, *Al Qur'anulkarim Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin Edisi Cetakan ke-5*, Q.S Ali Imran/3: 186, (Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2020), hal 264.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ps. 18.

⁸ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ps 32.

Kepala Daerah (PERKADA), dan keputusan kepala daerah.⁹ Berdasarkan wilayah administrasi pemerintah, jumlah wilayah administrasi di tahun 2022 sebanyak 34 provinsi; 416 kabupaten; 98 kota; 7.266 kecamatan; 8.506 kelurahan; 74.961 desa; dan 16.772 pulau. Sementara luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1.892.555,47 km², dengan jumlah penduduk pada Semester I Tahun 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa. Disini bisa di lihat percepatan pertumbuhan penduduk semakin meningkat bahkan pemerintah pun akan merencanakan targetan percepatan pemekaran wilayah untuk tarap pertumbuhan bisa diatur dengan adanya pemekaran wilayah dengan pembahasan yang di rancang untuk meminimalisir kepadatan penduduk untuk mempermudah dari segi administrasi juga pembangunan ekonomi daerah bahkan dari segi kontrol-evaluasinya akan lebih memudahkan. Masyarakat yang berada di wilayah pemekaran khususnya masyarakat desa dipandang perlu dalam rangka partisipasi pembangunan kabupaten/kota yang tersalurkan kepada masyarakat desa pada umumnya untuk menyentuh aspek pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat desa.¹⁰ Dari uraian yang di sampaikan pada latar belakang masalah ini maka perlunya dilakukan Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Pemerintahan Daerah.

b. Pendekatan Penelitian

⁹ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ps 17.

¹⁰Munarni “Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Potensi Desa” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area 2015),3.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran fenomena tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.¹¹ Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar). Dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan melakukan wawancara kepada salah satu Pemerintahan Kota Banjar dan juga Badan Pusat Statistik Kota Banjar sebagai narasumbernya. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai berita yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian yang diangkat peneliti adalah berkaitan dengan Evaluasi Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar).

2. Rumusan Masalah

Ekspansi regional selalu dibayangi oleh tuntutan dan harapan yang tinggi kesejahteraan sosial meningkat. Mungin tidak akan hilang pada tujuan pemekaran wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas Pelayanan publik. Dua puluh tahun setelah pemekaran kota Banjar mengidentifikasi beberapa masalah di bidang ekonomi dan layanan publik seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya angka partisipasi sekolah. Ada kontradiksi antara tujuan perluasan dan fakta yang dikandungnya. Relitanya adalah sesuatu yang dipertanyakan dan

¹¹ Ari Murti, Rahmani Timora Yulianti “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal, Journal of Islamic Economics and Islamic Business*, Vol. 03 No. 02 (November 2021), 912.

perlu penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana dampak positif dalam pemekaran terhadap kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar?
2. Bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pasca pemekaran daerah di Kota Banjar?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pemekaran Kota Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak positif dalam pemekaran terhadap kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pasca pemekaran daerah di Kota Banjar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah dalam pemekaran daerah dengan realita ajaran Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyumbangkan pemikiran dan juga masukan terhadap pemerintah daerah untuk senantiasa bekerjasama untuk mencapai tingkat kesejahteraan khususnya Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar).
2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi lembaga atau pemerintah Kota Banjar untuk senantiasa memberikan tinjauan dari daerah lain sebagai bentuk Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai prinsip dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum khususnya di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir disusun sebagai bentuk tata pikir atau alur pikir penulis dalam menjawab masalah dan menyelesaikan penelitian, sebagaimana seorang arsitektur yang membuat gambar rumah yang akan di bangun.¹²

Pemekaran wilayah pada umumnya memiliki daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran yang terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan, dari mulai aktifis, masyarakat, juga lembaga pusat pun ikut memperbincangkan itu. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi bahkan perdebatan dari sekelompok masyarakat yang membuat kebijakan sekalipun itu. Spekulasi bermunculan tujuan dari pada pemekaran tersebut dari mulai alasan politik, sosiologis, religius bahkan historis.¹³

Pemekaran wilayah dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dinamika politik masyarakat dengan luas wilayah yang memiliki cakupan di daerah yang wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya PP No.78 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Pemerintah pun telah

¹² Tim Penyusun Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Aksarasatu Cirebon 2021),15.

¹³ Rizal Fauzy , "*Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak*", (*Skripsi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011),2

memberikan potensi ruang yang lebih luas bagi daerah untuk melakukan pemekaran daerah wilayah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Pembentukan dan pemekaran daerah adalah pengaturan secara tertulis dalam penataan hubungan antara pusat dan daerah yang berlaku di undang-undang yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan sistem di pemerintahan daerah yang termaktub di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pemerintah daerah juga mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di pusat maupun di daerah yang di arahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip demokratis, pemerataan keadilan dan keistimewaan secara khusus daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan secara merata terhadap publik, guna mempercepat kesejahteraan, pembangunan, serta meningkatkan tingkat keseriusan pemerintah.¹⁶ Pengelolaan pemerintahan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yang penting esensi kesejahteraan tercapai.

Mekanisme yang sangat sentralistik selama ini dalam pemerintahan di pusat maupun di daerah menjadi persoalan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah desentralisasi dan otonomi apakah sudah menjadi komitmen yang kuat oleh pemerintah maupun masyarakat? Evaluasi percontohan otonomi daerah khususnya terdapat dua kecenderungan . *Pertama:* Pemerintah pusat dan juga provinsi belum bersungguh-sungguh mendukung pelaksanaan otonomi di Kabupaten/ kota, dan *Kedua;* pelaksanaan sistem pemerintahan daerah yaitu disentralisasi dan

¹⁴ Sidik Pramono dan Susie Berindra, "Pemekaran Tak Lagi Jadi "Obat" Mujarab", Kompas, 30 Agustus 2006 (Politik & Hukum), 5.

¹⁵ Dodi Saputra. "Studi Perkembangan Kenegarian Koto Besar Pasca Pemekaran Dari Kecamatan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya". (Skripsi. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengatuhan:Padang. Tahun 2016), 10.

¹⁶ Gustia Linanda Basri, "Efektivitas Pemekaran Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamaian Kabupaten Padang Pariaman", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau, 2015),2.

dekonsentrasi menjadikan implikasi yang jauh lebih besar terhadap kelembagaan di daerah.¹⁷

Perspektif Siyasah tentang pemekaran wilayah dalam Islam pun bukan hal baru dalam sejarah peradaban Islam sudah terbukti dengan kenyataan yang benar. Bahwa Rasulullah SAW ketika masih hidup upaya perluasan wilayah ini telah dilakukan melalui beberapa cara diantaranya ekspedisi yang beliau perintahkan kepada Khulafaur Rasyidin.¹⁸

Adapun Qaidah *Adh-Dhararu Yuzalu* qaidah ini adalah suatu kebutuhan bagi syar'i dari pembentukan hukum adalah dengan mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mensejahterakan dan menjamin kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap) Intinya kemaslahatan yang keberadaannya justru penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu penguasa hukum alam pemerintahan menggunakan keterangan yang jelas dari undang-undang secara umum dan tujuan khusus dari setiap pasal undang-undang sudah di sebutkan. Semua pembahasan dan perdebatan harus memahami suatu undang-undang yang menerapkannya pada nash, jiwa hukum dan memahami logika. Diterangkan di Kaidah ke lima ;

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : *“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنَّا حَتَّجْتُ أَحَدْتُ مِنْهُ وَإِذَا بَسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Artinya : *“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”*

Pemimpin merupakan keharusan untuk kepercayaan masyarakat suatu badan. Karena tanpa pemimpin maka suatu kumpulan tidak akan berjalan.

¹⁷ Ahmad Muzzawir, “Analisi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000”, *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, ISSN : 2685-6115 , (Juli 2007), 304-306.

Hal ini pun menegaskan salah satu hadis yang intinya bahwa tiap-tiap yang bernafas adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan akan di mintai pertanggungjawabannya. Begitupun seorang pemimpin baik pemimpin pusat ataupun pemerintah daerah yang menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan juga akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah di perbuatnya.¹⁹

Konsep pemekaran wilayah di Indonesia dapat diartikan sebagai pembentukan baru administrasi khususnya kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 33 menjelaskan bahwa pemekaran wilayah di lakukan melalui tahapan-tahapan daerah persiapan kabupaten/kota dengan memenuhi syarat administrasi. Persiapan dasar yaitu meliputi persyaratan kewilayahan juga persyaratan dasar kepastian daerah. Kepastian daerah adalah kemampun daerah untuk berkembang dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat.²⁰

1. Persyaratan dasar kewilayahan merupakan persyaratan berupa fisik wilayah dan kebutuhan lainnya serta untuk proses pembentukan wilayah yang baru, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 syarat-syarat dasar kewilayahan yaitu meliputi:
 - a. Luas wilayah minimal
 - b. Jumlah penduduk minimal
 - c. Batas wilayah
 - d. Cakupan wilayah
 - e. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan

Persyaratan dasar wilayah menyebutkan cakupan wilayah mengacu pada Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pada saat suatu wilayah administrasi harus dibentuk sekurang-kurangnya lima kabupaten/kota wajib membentuk daerah provinsi baru 5 kecamatan dan sekurang-kurangnya 5 kecamatan. 4 kabupaten diperlukan untuk membentuk daerah perkotaan baru. Batasan usia minimum untuk negara

¹⁹ Prof.Dr.Abdul Wahhab Khallaf., "*Ilmu ushul fiqh-kaidah hukum islam*" (Jakarta: Pustaka Amani,2003),291.

²⁰ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ps 33.

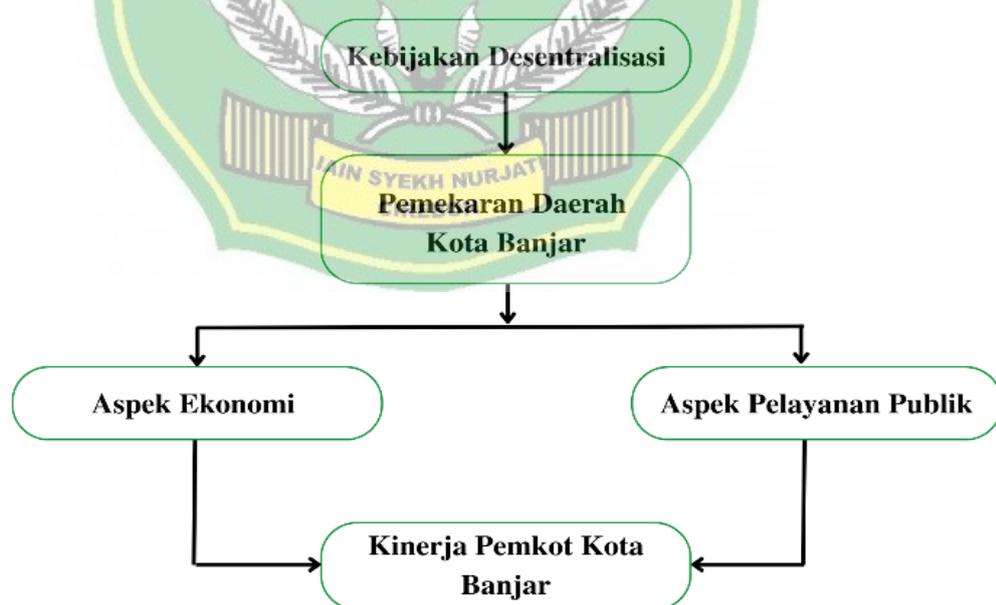
bagian federal, kabupaten/kota dan distrik dimasukkan, yaitu sepuluh tahun dan batas usia minimum. pembentukan batas usia minimum untuk distrik-distrik yang telah diikutsertakan sejak berdirinya kabupaten/kota.

2. Terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam kebutuhan *baseline* kapasitas daerah;
 - a. Sebuah geografi, parameter geografis meliputi letak ibu kota, hidrografi dan kerentanan terhadap bencana.
 - b. Parameter geografis dan demografi meliputi kualitas sumber daya manusia dan persebaran penduduk.
 - c. Keamanan, parameter keamanan meliputi tindakan umum dan criminal.
 - d. Konflik social, yaitu Kebijakan sosial, adat dan tradisi, parameter sosial, adat dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan parlemen, sosial dan organisasi masyarakat.
 - e. Potensi ekonomi, parameter keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan potensi keunggulan daerah.
 - f. Keuangan daerah, parameter ekonomi daerah meliputi kemampuan pendapatan awal daerah, penyiapan pendapatan awal pemohon daerah, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
 - g. Kapasitas administrasi negara, parameter kapasitas administrasi meliputi aksesibilitas layanan pendidikan dasar, aksesibilitas layanan kesehatan dasar, aksesibilitas layanan infrastruktur dasar, jumlah aparatur sipil negara di wilayah utama, serta rencana daerah persiapan daerah.
3. Peraturan administrasi kabupaten/kota memiliki perbedaan peraturan administrasinya. Adapun persyaratan administrasi negara, antara lain :
 - a. Sebuah kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dengan Kepala Negara/Walikota yang menjadi wilayah cakupan Daerah Persiapan Provinsi.
 - b. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Persyaratan administrasi untuk wilayah pemerintah/masyarakat sekarang meliputi:

- 1) Keputusan musyawarah desa yang menjadi wilayah hukum kabupaten/kota.
- 2) Persetujuan bersama DPD/DPRD dan Pengawas Umum/Walikota.
- 3) Kesepakatan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur daerah provinsi meliputi wilayah pendahuluan wilayah administrasi/kota yang akan dibentuk.²¹

Pemerintah daerah dituntut menampung aspirasi masyarakat tentang pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya menjadi jembatan masyarakat akan kepentingan umum.²² Harapan yang tinggi kesejahteraan sosial meningkat. Mungin tidak akan hilang pada tujuan pemekaran wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas Pelayanan publik²³

Dengan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan isi dari kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut.



Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol 9 No 1, (Maret 2017), 5.

²³ Rachim Putri Furry Pustika, "Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah", (Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013), 11.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Literature Review

1. Skripsi Ratri Furry Pustika Rachim dengan Judul “Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Daerah” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengingat kota sebagai daerah otonom baru hasil dari pemekaran Kabupaten Serang di Provinsi Banten, dengan tujuannya menyerupai cita-cita perluasan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemekaran wilayah terhadap efisiensi ekonomi dan kinerja pelayanan publik di Kota Serang dan sebagai pembanding Kinerja Kota Serang pasca pemekaran (2009-2011) dengan Kabupaten Serang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pengindeksan. Metode indeks digunakan untuk membandingkan kinerja daerah-daerah otonom baru yang wilayah utamanya terletak pada masa pasca pemekaran. Menampilkan hasil analisis dengan menggunakan metode indeks bahwa kegiatan ekonomi dan kegiatan pelayanan masyarakat kota Serang terbukti dapat mengkompensasi bahkan sedikit lebih baik daripada kinerja keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Serang.
2. Skripsi Iwan Riadi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Isu pemekaran Sungkai Marga Bunga Mayang sebenarnya Isu ini sudah dipelopori semenjak tahun tahun 2004, bahkan proposal kabupaten sudah dibuat. Namun proposal tersebut berhenti di tengah jalan. Kini isu tersebut muncul dengan deklarasi Sungkai Marga Bunga Mayang yang ditinjau oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan PPKS (Panitia Persiapan Kabupaten Sungkai) Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang sebuah masalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber data sekunder sebagai sumber yang utama. Penelitian ini didukung

oleh sumber data primer yaitu dengan sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan berupa wawancara kepada narasumber yaitu kepada Tim Persiapan Sungkai Bunga Mayang, Tokoh adat setempat, dan Tokoh Masyarakat. Metode penelitian ini dengan metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif yakni dengan menyajikan data secara terperinci dan melakukan penafsiran-penafsiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

3. Skripsi Yayan Amroni dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengaruh PD, JP, IPM serta untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber data yang di pakai adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data-data sekunder yaitu data *time series* dengan rentan waktu 7 tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2016. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu Pengeluaran Daerah (X1), Jumlah Penduduk (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3). Variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi pustaka dan dokumentasi. data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji beda paired t-test.
4. Skripsi Yuyun Novita Sari dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan yang mengalir di Pemerintahan Kota Medan dengan menggunakan metode pendekatan *value for money*. Penelitian yang ditulis dengan cara menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan dengan data-data sejumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, secara

keseluruhan realisasi pendapatan perkapita dan belanja kota medan memberikan catatan yang cukup jelas untuk si penulis menganalisis serta metode perbandingan dengan teori yang ada. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dilakukan dengan metode *value for money* diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ternyata mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas Pendapatan Daerah

5. Skripsi Zulfikar Fadel Ali dengan judul “Analisis Dampak Pemikiran Wilayah Kabupaten Pangandaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah dari tingkat infrastruktur, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan dalam mengukur tingkat kesejahteraan menurut BPS dan sesuai dengan tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Responden yang diteliti terdiri dari 100 orang melalui metode *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan antara tingkat infrastruktur sebelum pemekaran dan tingkat infrastruktur sesudah pemekaran, 2) terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan sebelum pemekaran dan tingkat kesehatan sesudah pemekaran, 3) terdapat perbedaan antara tingkat pendidikan sebelum pemekaran dan tingkat pendidikan sesudah pemekaran.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan itu sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoritic perspective*) suatu penelitian.²⁴ Sedangkan, untuk penelitian sendiri diartikan bahwa suatu proses untuk pengumpulan data dan analisis data yang digunakan secara sistematis dan logis secara akurat

²⁴ Gulo, W, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 48.

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode, bagaimana cara atau teknik melakukan penelitian. Proses yang digunakan dalam metodologi penelitian menggunakan logika penelitian, seperti masalah penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara luas, rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai aspek yang berkaitan dengan Efektivitas Pemekaran Daerah Studi Kasus di Pemerintahan Kota Banjar Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁶ Pada umumnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara fenomenologis dimana penelitian menunjukkan lapangan penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi, dalam penelitian fenomenologis juga sangat bergantung terhadap pengalaman informan karena berhadapan langsung dengan fenomena yang sedang di teliti.

Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data untuk dianalisis dan diinterpretasikan.

2. Sumber Data

²⁵ Yusuf, “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pembedayaan Ekonomi Mustahik Di Zakat Center Thoriqotul Jannah*,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), 19.

²⁶ J.r Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.

Dalam sebuah subjek atau yang diperoleh dari sebuah data dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer yaitu pengambilan data yang langsung dari objek atau subjek penelitian pertama. Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara mendalam di Kantor Badan Pusat Statistik Kota Banjar. Berkomitmen untuk menyediakan data statistik yang akurat dan terpercaya guna mendukung pembangunan daerah . Adapun yang akan diwawancarai mengenai 1) dampak positif dalam pemekaran terhadap kinerja pemerintah dalam kesejahteraan Kota Banjar , 2) terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan sebelum pemekaran dan tingkat kesehatan sesudah pemekaran, 3) terdapat perbedaan antara tingkat pendidikan sebelum pemekaran dan tingkat pendidikan sesudah pemekaran.
 - b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal dan sumber data lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan judul proposal ini, yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari data primer dan sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.
3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Yang bisa dilakukan dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin.²⁷ Mengenai pengamatan yang dilakukan adalah di Badan Pusat Statistik Kota Banjar dalam Efektivitas Pemekaran Daerah.
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya-jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi, pikiran, pendapat,

²⁷ Gulo, W, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 79.

perasaan orang terhadap suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.²⁸ Narasumber yang dituju dalam penelitian ini yaitu di Kantor Badan Pusat Statistik Kota Banjar, sebagian aparatur pemerintahan di Kota Banjar dan juga masyarakat setempat yang ada di Kota Banjar. Yang akan diwawancarai mengenai 1) terdapat perbedaan antara tingkat infrastruktur sebelum pemekaran dan tingkat infrastruktur sesudah pemekaran, 2) terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan sebelum pemekaran dan tingkat kesehatan sesudah pemekaran, 3) terdapat perbedaan antara tingkat pendidikan sebelum pemekaran dan tingkat pendidikan sesudah pemekaran.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian literature atau *library research* dengan metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan dan analisis data.²⁹
- d. Dokumentasi, yaitu upaya mengumpulkan data, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan.³⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen di Kantor Badan Pusat Statistik Kota Banjar, sebagian aparatur pemerintah di Kota Banjar dan juga masyarakat setempat yang ada di Kota Banjar.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Analisis juga berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil serta mencari pola dan tema-tema yang sama. Hasil

²⁸ J.r Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 116.

²⁹ J.r Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 118.

³⁰ Gulo, W, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 83.

analisis kemudian digabungkan kembali sebagai analisis yang dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh.³¹

Teknik analisis dalam tulisan ini melibatkan proses seleksi atas semua informasi yang didapatkan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan maksud penelitian, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks, dan wacana (*discourse*).

Teknik yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif, dimana bertujuan untuk menguraikan subjek sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenainya serta menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan data tentang Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar) kemudian peneliti menganalisa dengan teori Hukum Pemerintahan Daerah, selanjutnya akan diambil sebuah kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Pengajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpanan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid

³¹ J.r Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 121-122.

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

d. Lokasi Penelitian

Di Kantor Badan Pusat Statistik Kota Banjar, sebagian aparatur pemerintahan di Kota Banjar dan juga masyarakat setempat yang ada di Kota Banjar.

e. Rencana Waktu

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai bulan Januari 2023 hingga Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut:

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Konsep Kebijakan Desentralisasi Efektivitas Pemekaran Daerah Studi Kasus di Pemerintahan Kota Banjar, pada bagian ini menguraikan tentang landasan teori-teori serta pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu teori tentang Kebijakan otonomi dan desentralisasi yang di atur dalam undang-undang dan Perspektif Siyasah yang menjelaskan segala mekanisme pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai dengan topik Pembentukan dan Pemekaran Daerah juga Teori yang dijelaskan pada bagian ini yaitu tinjauan umum dengan Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah.

Bab Ketiga: Kondisi Objek Penelitian, membahas gambaran umum mengenai Efektivitas pemekaran daerah studi kasus di Pemerintahan Kota Banjar dan juga Badan Pusat Statistik Kota Banjar yakni penjabaran

mengenai profil Kota Banjar, visi dan misi, serta program-program yang menjadi kegiatan utama pemerintah Kota Banjar.

Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Efektivitas pemekaran daerah studi kasus di Pemerintahan Kota Banjar. Dalam bab ini di bahas mengenai bagaimana dampak positif dalam pemekaran terhadap kinerja pemerintah terhadap kesejahteraan di Kota Banjar dan bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pasca pemekaran daerah di Kota Banjar.

Bab Kelima: Penutup, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sesuai dengan PP No.78 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

